

ANALISIS KEBERADAAN SEKTOR EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Vivi Erlinda Thio Putri¹
Made Kembar Sri Budhi²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: vivierlindathioputri@gmail.com

ABSTRAK

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sektor potensial di kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan (2) menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 54 pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non perilaku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient* (LQ), dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Provinsi Bali mempunyai 4 kabupaten yang rata-ratanya termasuk dalam sektor potensial, kabupaten tersebut ialah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem. Sektor ekonomi yang potensial di keempat kabupaten tersebut ialah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; penyediaan akomodasi dan makan minum. (2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap potensi ekonomi ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Kata kunci: sektor potensial, potensi daerah, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

The economic potential of an area is the economic capacity that is in the area that is possible and feasible to be developed, so that it will continue to develop as a source of livelihood for the local people. This study aims to 1) analyze the potential sectors in districts / cities in the Province of Bali, and 2) analyze the relationship of economic growth with economic potential in districts / cities in the Province of Bali. The data source used this study is secondary data with 54 observations. This study uses a non-behavioral observation data collection method. Data analysis techniques used in this research are Location Quotient (LQ), and simple regression analysis. The results showed that (1) Bali Province has 4 regencies whose average is included in the potential sector, these districts are Jembrana Regency, Badung Regency, Klungkung Regency, and Karangasem Regency. Potential economic sectors in the four districts are agriculture, forestry and fisheries; mining and excavation; water supply, waste management, waste and recycling; construction; processing industry; transportation and warehousing; wholesale and retail trade; car and bicycle repair; providing accommodation and eating and drinking. (2) Economic growth has a positive effect on economic potential in Bali's regencies / cities.

Keywords: potential sector, regional potential, economic growth

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga Negara Indonesia yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dengan Pancasila sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Pembangunan nasional merupakan rangkaian yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk mewujudkan tujuan di bentuknya Republik Indonesia yang tata kelolanya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan dari pembangunan nasional dapat terwujud apabila didukung oleh tingkat kualitas sumber daya manusia yang baik (Ardhiyanti,2016). Perekonomian Indonesia telah berkembang dengan kuat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun dilanda guncangan ekonomi yang terjadi selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 (Elias dan Noone, 2011). Indonesia memiliki catatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang mengesankan selama dua dekade terakhir (Arsenia dkk, 2003). Hal ini membuktikan Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil mengelola perekonomiannya dengan sangat baik, dengan menerbitkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk menunjang pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hubungan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dan tidak dapat dilepaskan karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian dan instrument dari pembangunan nasional. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dengan wilayah kedaulatan yang luas mewajibkan Pemerintah Republik Indonesia

menyelenggarakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dalam pembangunan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penentuan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur untuk masyarakat yang berada pada suatu wilayah (Oka, 2015). Kebijakan lain sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat salah satunya melalui kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya yang disesuaikan dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kusuma, 2016). Pengambilan keputusan oleh pemerintah lokal akan lebih didengar dalam memenuhi pilihan lokal yang bermacam-macam, sehingga lebih bermanfaat bagi efisiensi alokasi (Fajrii, 2016). Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi (Saerofi, 2005).

Menurut UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan, sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Otonomi daerah akan membawa efisiensi dan efektifitas pada penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak bisa dihadirkan oleh pemerintah pusat, karena pemerintah daerah mengetahui dengan baik potensi dan tantangan yang dihadapi daerah otonomnya. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah sangat penting karena dapat memberikan kesempatan besar bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengambil keputusan yang akan berdampak langsung kepada daerahnya (Utami Dewi dkk, 2014). Menurut Fatkhul Muin (2004) tiap-tiap daerah mempunyai sejarah dan sifat khusus tersendiri. Oleh karena itu desentralisasi diperlukan untuk merangsang percepatan pembangunan daerah,

meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperdayakan peran masyarakat daerah setempat. Desentralisasi yang dibarengi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung menyebabkan pemerintahan daerah memiliki ruang diskresi yang lebih luas dalam menentukan tingkat pelayanan publik (Nizza dan Halley, 2017).

Dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah, salah satu aspek yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam seefektif dan seefisien mungkin (Junaidi dan Zulgani, 2011). Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain (Herry Derwanto, 2002). Suatu daerah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sektor yang bisa menjadi andalan / unggulan daerah tersebut. Sektor andalan / unggulan ini perlu ditentukan oleh suatu daerah karena setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda baik dari sisi kesuburan lahan, letak geografis, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang ada. Masing-masing daerah memiliki keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda yang ditunjukkan dengan pertumbuhan dan peran sektor-sektor yang bersangkutan. Identifikasi dan klasifikasi sektor diperlukan untuk memberikan gambaran sektor mana yang aktifitasnya menjadi basis perekonomian atau unggulan, potensial, sedang berkembang dan mana pula yang tertinggal, sehingga dapat dilakukan penentuan sektor prioritas. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor yang menjadi sektor potensial, sehingga

dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Aryanti, 2009). Strategi pembangunan ekonomi daerah yang digunakan dituntut mampu menjawab permasalahan dan isu-isu utama ekonomi di daerah, seperti masalah pertumbuhan penduduk, ketimpangan sektor ekonomi, dan urbanisasi. Pemerintahan daerah yang mampu menerbitkan kebijakan yang tepat akan dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain dan dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di dalam wilayah otonomnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Rudy Badrudin, 2012). Pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat melalui perubahan pada Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan pertumbuhan ekonomi regional dapat dilihat melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Wiwekananda dan Suyana, 2016). Terhitung mulai tahun 2015 klasifikasi PDB menurut lapangan usaha kini menggunakan 17 sektor ekonomi, yang awalnya menggunakan 9 sektor ekonomi (Suhariyanto, 2014). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sebuah indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam misi meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap Negara (Aprilia dan Suyana, 2015). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah peningkatan PDRB yang mampu menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah (Yusi Pramandari, 2014).

Provinsi Bali merupakan provinsi dengan peringkat ke-12 di Indonesia dalam laju pertumbuhan PDRB per kapita yaitu sebesar 5,05 persen (BPS, 2016). Sebagai provinsi yang memiliki keindahan alam dan tradisi budaya yang sangat

kaya, Provinsi Bali tidak memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas (Wijaya dan Mustika, 2014). Wilayah Pulau Bali sebagian besar terdiri dari pegunungan dan berbukit-bukit membujur dari Barat ke Timur (Yogi Swara, 2011). Sektor pariwisata telah menjadi sektor andalan di Provinsi Bali, sektor ini menyumbang 489,34 juta dolar AS (BPS, 2017). Menurut menteri pariwisata Arief Yahya (2017) Provinsi Bali adalah penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata Indonesia. Provinsi Bali yang memiliki delapan kabupaten dengan potensi daerahnya yang relatif berbeda telah mengalami disparitas pendapatan (Gama, 2009). Kabupaten/kota di Provinsi Bali masing-masing mempunyai keunggulan yang tergantung pada letak wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Perbedaan struktur perekonomian dari setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam merencanakan kebijakan perekonomian. Setiap daerah juga harus menentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan. Sektor unggulan umumnya dicerminkan oleh sektor basis yang dimiliki setiap kabupaten/kota dimana sektor tersebut memiliki peranan ekspor sehingga tidak ada keterbatasan permintaan dan dapat terus dikembangkan. Sektor basis dapat dijadikan andalan untuk mengembangkan wilayah, sehingga dapat dipilih sektor unggulan dari sektor basis yang ada di setiap kabupaten/kota. Sektor unggulan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Pada Tabel 1.1 terlihat kabupaten yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Bali pada tahun 2018 adalah Kabupaten Badung yang mencapai Rp. 35.283 juta, sedangkan Kabupaten Bangli hanya mampu memberikan

kontribusi sebanyak Rp. 4.351 juta, terjadi disparitas pendapatan yang sangat tinggi antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli, yang membuktikan terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Bali sebagai salah satu wilayah dengan sebaran yang cukup tinggi, juga mengalami ketidakmerataan dalam percepatan pembangunan antar wilayahnya (Dewi Rustariyani, 2011). Perbedaan potensi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali menimbulkan ketimpangan pembangunan daerah, daerah yang memiliki potensi pariwisata yang baik cenderung lebih maju dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki potensi pariwisata. Kebanyakan sektor berpusat di Kabupaten Badung sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Bali (Adipuryanti, 2015). Perkembangan investasi yang terjadi di Provinsi Bali sangat dominan di Bali Selatan yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar (Wahyuni dkk., 2014). Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota menuntut pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang tepat sesuai dengan potensi daerah masing-masing agar bisa merangsang pembangunan daerah.

Tabel 1 PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2013-2018 (milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Jembrana	6.727	7.134	7.576	8.027	8.452	8.924	7.806
2	Tabanan	11.178	11.908	12.644	13.420	14.141	14.950	13.040
3	Badung	25.666	27.458	29.170	31.157	33.053	35.283	30.297
4	Gianyar	13.361	14.269	15.168	16.125	17.008	18.031	15.660
5	Klungkung	4.280	4.536	4.813	5.115	5.387	5.683	4.969
6	Bangli	3.281	3.472	3.686	3.916	4.124	4.351	3.805
7	Karangasem	8.002	8.482	8.991	9.524	10.007	10.556	9.260
8	Buleleng	16.587	17.741	18.818	19.524	21.025	22.206	19.316
9	Denpasar	25.026	26.778	28.422	30.273	32.109	34.168	29.462
Provinsi Bali		99.991	106.951	114.103	121.779	129.137	144.964	119.487

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 1 menunjukkan besaran PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Terdapat 4 kabupaten di Provinsi Bali memiliki jumlah PDRB rendah dengan nilai dibawah Rp. 10.000.000 (juta) pada kurun waktu 2013-2018, yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan jumlah PDRB paling rendah di Provinsi Bali kurun waktu 2013-2018 dengan rata-rata Rp. 3.805 juta, namun jumlah PDRB Kabupaten Bangli mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 berhasil mencapai PDRB dengan jumlah Rp. 5.683 juta, yang pada tahun 2013 jumlah PDRB Kabupaten Klungkung dibawah angka Rp. 5.000.000 (juta). Pada kurun tahun 2013-2018 PDRB Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang positif pada tahun 2013 PDRB kabupaten berjumlah Rp. 6.727 juta, meningkat lagi pada tahun 2014 PDRB kabupaten berjumlah Rp. 7.134 juta, meningkat lagi pada tahun 2015 dengan jumlah Rp. 7.576 juta, pada tahun 2016 meningkat lagi dengan jumlah Rp. 8.027 juta, pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Jembrana berjumlah Rp. 8.452 juta, dan puncaknya pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Jembrana menjadi Rp. 8.924 juta. Kabupaten Karangasem memiliki jumlah PRDB yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki PDRB dibawah Rp.10.000.000 pada kurun waktu 2013-2018 dengan jumlah 9.260 juta, namun PDRB Kabupaten Karangasem selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2013-2018 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Jembrana	5,69	6,05	6,19	5,96	5,29	5,59	5,79
2	Tabanan	6,45	6,53	6,19	6,14	5,37	5,72	6,06
3	Badung	6,82	6,98	6,24	6,81	6,09	6,75	6,61
4	Gianyar	6,82	6,80	6,30	6,31	5,48	6,01	6,28
5	Klungkung	6,05	5,98	6,11	6,28	5,32	5,50	5,87
6	Bangli	5,94	5,83	6,16	6,24	5,33	5,50	5,83
7	Karangasem	6,16	6,01	6	5,92	5,08	5,48	5,77
8	Buleleng	7,15	6,96	6,07	6,02	5,39	5,62	6,20
9	Denpasar	6,96	7	6,14	6,51	6,06	6,41	6,51
Provinsi Bali		6,69	6,73	6,03	6,33	5,57	6,35	6,28

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Berdasarkan Tabel 2 pada kurun waktu 2013-2018 terdapat 4 kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi rendah dengan nilai dibawah 6 persen yaitu: Kabupaten Karangasem sebesar 5,79 persen, Kabupaten Jembrana sebesar 5,79 persen, Kabupaten Klungkung sebesar 5,87 persen, dan Kabupaten Bangli dengan laju pertumbuhan sebesar 5,83 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kebijakan pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran dan salah dalam menentukan prioritas pembangunan juga kuat pengaruhnya terhadap rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Tabel 3 dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memuat bagaimana perubahan dan kondisi sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi dalam PDRB Provinsi Bali atas dasar harga konstan 2010 pada kurun waktu 2013-2018. Tabel 1.3 menunjukkan PDRB Provinsi Bali pada kurun waktu 2013-2018, dengan lapangan usaha yang telah di klasifikasikan ke dalam 9 sektor ekonomi. PDRB Provinsi Bali menurut lapangan usaha selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Pada Tahun 2013 jumlah PDRB Provinsi Bali sebesar 114.103.580 juta rupiah sedangkan pada tahun 2018 jumlah PDRB Provinsi Bali sebesar 154.150.978 juta, terdapat peningkatan jumlah PRDB sebesar 40.047.407 dalam kurun waktu 2013-2018 yang menunjukkan tiap tahunnya kondisi perekonomian Provinsi Bali menjadi semakin baik.

Tabel 3 PDRB Tahunan provinsi bali atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha kurun waktu 2013-2018 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.343.285	18.151.208	18.637.347	19.295.696	19.821.975	20.849.863
2	Pertambangan dan Penggalian	1.555.359	1.546.105	1.440.563	1.502.268	1.480.668	1.441.410
3	Industri Pengolahan	7.565.247	8.237.390	8.808.507	9.104.676	9.177.697	9.698.076
4	Pengadaan Listrik dan Gas	251.317	273.862	278.205	301.329	317.834	323.994
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	261.538	280.903	286.480	304.643	312.931	319.284
6	Konstruksi	11.239.448	11.441.351	12.014.635	12.886.363	13.911.362	15.363.906
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	9.963.180	10.677.992	11.525.812	12.290.931	13.254.012	14.254.148
8	Transportasi dan Pergudangan	8.512.259	9.008.992	9.425.814	10.182.603	10.691.844	11.349.098
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.287.903	23.807.924	25.309.402	26.983.848	29.420.233	31.250.818
PDRB		114.103.580	121.787.574	129.126.562	137.296.445	144.944.691	154.150.978

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Pada kurun waktu 2013-2018 jika diambil rata-rata terdapat 3 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Bali, yaitu: 1) Penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar Rp. 31.250.818 juta, 2) Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 20.849.863 juta, dan 3) Kontruksi sebesar Rp. 15.363.906 juta.

Menurut Blakely (1994:50) pembangunan ekonomi daerah merupakan kondisi yang berorientasi pada proses pembangunan institusi baru, pengembangan kapasitas tenaga kerja, pembangunan industri alternatif, identifikasi pasar, alih teknologi serta membangun perusahaan lainnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses yang kompleks yang terjadi dari waktu ke waktu, potensi pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap daerah tergantung pada kondisi ekonomi regional (Jeffry, 2007). Karakteristik dari pembangunan ekonomi daerah lebih ditekankan pada pembangunan yang bersifat endogen yang artinya memakai sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah untuk membuat kesempatan kerja baru dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah beserta masyarakatnya mengelola sumber daya yang tersedia dan membuat suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memacu kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah (wilayah) adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu daerah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di daerah tersebut. (Tarigan, 2005:49).

Teori basis ekonomi yaitu membedakan kegiatan perekonomian regional kedalam dua sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah sektor yang kinerja utamanya bergantung pada pengaruh kondisi ekonomi eksternal terhadap perekonomian lokal untuk pembangunan ekonomi, sementara sektor non-basis adalah sektor yang kinerja utamanya bergantung pada kondisi ekonomi internal regional itu sendiri dan terfokus pada persediaan untuk konsumsi lokal (Thomas *et al*, 1998). Teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1978:14) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Dalam teori basis ekonomi bahwa semua wilayah merupakan sebuah sistem sisio ekonomi yang terpadu. Bertambah banyaknya kegiatan basis suatu daerah akan berpengaruh terhadap bertambahnya arus pendapatan daerah tersebut, yang selanjutnya akan menambah permintaan barang dan jasa di daerah tersebut, kemudian akan menumbuhkan kegiatan non-basis (Dewi Ardhiyanti, 2016). Sebaliknya jika kegiatan basis berkurang akan berdampak pada berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu daerah, sehingga akan mengakibatkan turunnya permintaan produk dari kegiatan non-basis.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk menganalisis sektor potensial pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2) untuk menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data untuk mengetahui sektor potensial di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dan menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Variabel terikat dalam penelitian ini laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2013-2018 (dalam persen) (Y). Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, 2013-2018 (Y), adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah menuju keadaan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (dalam persen).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013-2018 atas dasar harga konstan 2010 (dalam milyar rupiah) (X). PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013-2018 atas dasar harga konstan 2010 (X), adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (dalam milyar rupiah per tahun).

Data Kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata yang berisi uraian dan penjelasan. Dalam Penelitian ini data kualitatif yaitu teori yang terkait dengan penelitian. Data Kuantitatif merupakan data yang berupa angka yang dapat dihitung. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa angka-angka yang dimuat pada Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder merupakan data yang berupa dokumen atau catatan yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak terkait sehingga dapat digunakan untuk kepentingan analisis data (Sugiyono, 2007:129). Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada kurun waktu 2013-2018. Data yang digunakan berupa tabel PDRB kabupaten/kota dan PDRB Provinsi Bali menurut lapangan usaha.

Teknik analisis pertama yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ), analisis kedua menggunakan analisis Tren Linear, dan analisis yang ketiga menggunakan analisis Regresi Sederhana dengan Variabel Dummy. *Location Quotient* merupakan salah satu alat untuk membandingkan corak kawasan ekonomi lokal terhadap kegiatan ekonomi regional atau nasional (Gemechis *et al.*, 2008). Metode LQ menghasilkan dua klasifikasi penting yaitu sektor basis dan non basis, serta terfokus pada substitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor dan pengaruh eksternal (Cubukcu, 2011). Untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis perekonomian adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Zheng, 2013).

$$LQ = \frac{V_{is}/V_{ts}}{V_{ir}/V_{tr}} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- LQ = Nilai *Location Quotient*
- $V_i(s)$ = Jumlah PRDB suatu sektor di wilayah studi
- $V_t(s)$ = Jumlah PDRB total di wilayah studi
- V_{ir} = Jumlah PDRB suatu sektor di wilayah referensi
- V_{tr} = Jumlah PDRB total di wilayah referensi

Berdasarkan Hasil dari perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$), maka sektor tersebut termasuk sektor basis atau menjadi sumber pertumbuhan, artinya sektor tersebut mampu menghasilkan kebutuhan lebih dari yang diharapkan untuk perekonomian di wilayahnya dan akan mampu menjadi sektor atau industri ekspor (Schaffer, 2010).
2. Jika LQ sama dengan satu ($LQ = 1$) bermakna bahwa sektor tersebut tergolong non basis, artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk mengekspor (Glimmer, 1989)
3. Jika LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$), maka sektor tersebut termasuk sektor non basis, artinya sektor tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sehingga diperlukan tambahan dari sektor atau daerah lainnya. Sektor non basis juga bisa di golongkan ke dalam sektor yang berorientasi pada impor.

Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Dimana Analisis regresi dapat dirumuskan sebagai berikut (Wirawan, 2016: 227).

$$Y = a + bX \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013-2018 (dalam persen)

a = *intercept*/konstanta

b = parameter elastisitas

X = potensi daerah , X=0 tidak adanya potensi daerah , X=1 adanya potensi daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis sektor potensial pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002). Potensi ekonomi ini mencakup semua kekayaan atau sumber daya fisik maupun non fisik pada area atau wilayah tertentu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan daerah.

Sektor unggulan adalah sektor yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan terbentuk dari pengembangan produksi yang dihasilkan oleh potensi yang dimiliki daerah. Sektor unggulan tersebut juga bukan hanya mampu untuk memenuhi permintaan dari dalam daerahnya saja namun juga mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerahnya. Dikatakan sektor unggulan apabila sektor tersebut memiliki keunggulan baik secara komparatif maupun secara kompetitif (Erawati, 2012).

Sektor unggulan dapat dijadikan salah satu penggerak dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Sukirno (2010 : 66) menyatakan bahwa didalam proses pembangunan akan muncul industri pemimpin (*leading industry*), suatu industri yang menjadi penggerak utama dalam suatu pembangunan daerah. Apabila suatu industri atau beberapa industri pemimpin berkembang maka pertambahan produksi tidak terbatas pada kenaikan jumlah produksi dalam industri

pemimpin tetapi juga pada kenaikan jumlah produksi industri lain yang erat hubungannya dengan industri pemimpin tersebut.

Kadariah (1979 : 70) menyatakan bahwa banyak teknik analisis yang biasa dipakai untuk memilih dan menentukan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan dan yang tergolong paling sederhana adalah teknik *Location Quotient* (LQ). Dalam teknik ini, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. Sektor basis, yaitu kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor, atau sektor-sektor yang mendapatkan penerimaan karena menjual barang-barang dan jasa-jasa kepada masyarakat di luar daerah yang bersangkutan
2. Sektor non basis, merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau komunikasi di dalam wilayah.

Sektor potensial atau unggulan adalah sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor anugrah (*endowment factor*), selanjutnya sektor ini akan berkembang dengan didukung adanya investasi sehingga bisa menjadi tumpuan di masa yang akan datang (Nurlatifa, 2006). Sektor potensial/unggulan harus memiliki kelebihan, yaitu unggul secara komparatif dan unggul secara kompetitif. Menurut Arsyad (2010:367), terdapat beberapa ukuran pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya dapat menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, yaitu salah satunya adalah *Location Quotient* (LQ).

Untuk mengetahui sektor potensial di Provinsi Bali, alat analisis yang digunakan adalah dengan melihat nilai *Location Quotient* (LQ), yang merupakan

perbandingan kontribusi masing-masing sektor di kabupaten/ kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Bali. Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor/sub sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor/sub sektor potensial (basis). Apabila nilai $LQ < 1$ maka sektor/ sub sektor tersebut bukan merupakan sektor potensial (non basis).

Menurut Kangjuan, (2013) *Location Quotient* berarti rasio di antara dua proporsi. Salah satu proporsi adalah nilai output dari satu industri atau sektor tertentu dibagi dengan total PDRB di wilayah tersebut. Proporsi lain adalah seluruh nilai output industri atau sektor di wilayah nasional di bagi dengan PDRB di wilayah nasional tersebut. *Location Quotient* adalah metode untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian yang lebih luas (Ann Hodgkinson, 2005). *LQ* merupakan rasio antara PDRB atau jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu (industri) terhadap total PDRB atau total tenaga kerja sektor yang sama dengan total PDRB atau tenaga kerja di provinsi (Suyana Utama, 2010). Menurut Gemechis *et al.* (2008) *Location Quotient* berarti rasio di antara dua provinsi. Salah satu provinsi adalah nilai output dari satu industry atau sektor tertentu dibagi dengan total PDRB di wilayah tersebut.

Berdasarkan Tabel 4, maka dapat teridentifikasi Provinsi Bali mempunyai 4 kabupaten yang rata-ratanya termasuk dalam sektor basis, kabupaten tersebut ialah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem.

Tabel 4 Hasil Analisis LQ Provinsi Bali Tahun 2013-2018

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata LQ
1	Jembrana	0.990	1.002	1.010	1.005	1.007	1.008	1.003
2	Tabanan	0.887	0.886	0.894	0.894	0.903	0.908	0.895
3	Badung	1,060	1,055	1,056	1,051	1,045	1,046	1,053
4	Gianyar	0,975	0,977	0,980	0,976	0,977	0,978	0,977
5	Klungkung	1,237	1,238	1,242	1,210	1,220	1,231	1,230
6	Bangli	0.926	0.927	0.948	0.946	0.958	0.956	0.943
7	Karangasem	1,158	1,164	1,195	1,185	1,197	1,215	1,185
8	Buleleng	0,884	0,883	0,886	0,890	0,885	0,887	0,885
9	Denpasar	0,996	0,980	0,990	0,985	0,988	0,981	0,986

Sumber: BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018 (data diolah)

Pembahasan menanggapi pernyataan berdasarkan hipotesis yang menduga bahwa Denpasar, Gianyar dan Tabanan memiliki $LQ > 1$:

- a. Memang Sarbagita adalah daerah utama pariwisata di Bali akan tetapi *share* PDRB daerah tersebut (Tabanan, Denpasar, Gianyar) terhadap PDRB Bali mempunyai disparitas yang lebih dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
- b. Rasio daerah studi dengan daerah referensi menunjukkan bahwa tiga daerah sarbagita proporsi perbandingannya relatif sedikit dibanding kabupaten lainnya.

Setelah diketahui 4 kabupaten yang rata-ratanya termasuk dalam sektor basis maka pengambil kebijakan akan dapat lebih mudah memacu pertumbuhan perekonomian di daerah dengan meningkatkan peranan sektor basis pada tiap kabupaten. Yang menjadi sektor basis pada ke-4 kabupaten tersebut antara lain ialah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Kontruksi; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda. Peningkatan

peranan sektor basis akan dapat meningkatkan atau memacu perkembangan sektor ekonomi lainnya seperti sektor yang belum menjadi sektor basis yaitu Sektor Pengadaan Listrik dan Gas;, karena sektor basis pada tiap kabupaten dapat memberikan efek penyebaran kepada sektor lainnya.

2) Pengaruh Potensi Daerah Terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali

Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Dimana Analisis regresi dapat dirumuskan sebagai berikut (Wirawan, 2016: 227).

$$Y = a + bX \dots \dots \dots (4)$$

Persamaan regresinya :

$$Y = 1.772 + 1.267X \dots \dots \dots (5)$$

Berdasarkan persamaan regresi dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 1.772; artinya jika potensi daerah (X) nilainya adalah 0, maka pertumbuhan ekonomi (Y) nilainya positif yaitu sebesar 1772. Koefisien regresi potensi daerah (X) sebesar 1.267; artinya jika potensi daerah mengalami kenaikan 1%, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.267. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara potensi daerah dengan pertumbuhan ekonomi, semakin naik potensi daerah maka semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya jika potensi daerah turun 1% maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 1.267. Jadi nilai Y akan meningkat jika X meningkat, sebaliknya nilai Y akan menurun jika X menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan potensi daerah.

Nilai $t_{hitung} (7,453) > t_{tabel} (2,364)$ maka H_0 ditolak. Artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara potensi daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian Negara dapat memberikan tambahan pendapatan untuk masyarakat pada periode tertentu (Arsenio *et al.*, 2003). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi menurut Simonn Kuznets (dalam Jhingan, 2000:57), adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu daerah untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya (Al Husna, 2017). Definisi ini memiliki 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan beraneka ragam barang kepada penduduk; ketiga, pemakaian teknologi secara luas serta efisien membutuhkan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan umat manusia dapat digunakan secara tepat.

Boediono (1999:8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Jadi, dengan bukan bermaksud ‘menggurui’, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu. Boediono (1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output

perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan (Agus, 2009). Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

SIMPULAN

Kabupaten/Kota yang rata-ratanya termasuk dalam sektor basis di Provinsi Bali menggunakan analisis LQ, maka kabupaten tersebut ialah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem. Setelah diketahui 4 kabupaten yang rata-ratanya termasuk dalam sektor basis maka pengambil kebijakan akan dapat lebih mudah memacu pertumbuhan perekonomian di daerah dengan meningkatkan peranan sektor basis pada tiap kabupaten. Yang menjadi sektor basis pada ke-4 kabupaten tersebut antara lain ialah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Kontruksi; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda. Peningkatan peranan sektor basis akan dapat meningkatkan atau memacu perkembangan sektor ekonomi lainnya seperti sektor yang belum menjadi sektor basis yaitu Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, karena sektor basis pada tiap kabupaten dapat memberikan efek penyebaran kepada sektor lainnya.

Berdasarkan perhitungan regresi sederhana didapatkan hasil yang signifikan bahwa adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi.

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah setelah diketahui 4 kabupaten yang rata-ratanya termasuk memiliki sektor basis maka pengambil kebijakan akan dapat lebih mudah memacu pertumbuhan perekonomian di daerah dengan meningkatkan peranan sektor basis pada tiap kabupaten. Dengan cara melakukan pembenahan infrastruktur, pengembangan sektor, memanfaatkan teknologi-teknologi yang telah berkembang saat ini, mencari ilmu-ilmu baru lewat situs-situs resmi yang dapat diakses pada situs Google sebagai penyedia informasi guna tercapainya peningkatan perekonomian daerah.

Sektor potensial merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, antara lain seperti sektor pertanian, sektor industri, dan sektor pariwisata merupakan sektor yang mempengaruhi sektor ekonomi basis dalam suatu daerah, karena sektor basis dapat memberikan dampak yang positif terhadap sektor lainnya. Pemerintah di setiap kabupaten tersebut sebaiknya menyediakan anggaran lebih besar pada sektor-sektor tersebut sehingga dapat memberikan dampak positif menuju sektor basis, serta pemerintah perlu melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia guna tercapainya optimalisasi pertumbuhan ekonomi, dimana SDM ini sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

REFERENSI

- Adipuryanti, Ni Luh Putu Yuni dan Sudibia, I Ketut. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi KabupatenKota di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, Vol. 11, No. 1 Juli 2011.
- Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri. 2009. Penentu Sektor unggulan dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10(1), pp:34-50.
- Al Husna, Nizza dan Yudistira, Muhammad Halley. 2017. Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia . *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 10 No. 2.
- Ann Hodgkinson. 2005. Location quotients and shift-share analysis: a low cost approach to regional development planning. *Faculty of Commerce Papers University of Wollongong*, Australia.
- Aprilia Kesuma, Ni Luh; Suyana Utama, I Made. 2015. Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 8 No.1.
- Arief Yahya, 2017. Bali, Penyumbang Devisa Terbesar di sektor Pariwisata. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/10/bali-penyumbang-devisa-terbesar-di-sektor-pariwisata>. diakses 15 September 2019.
- Arsenio M. Balisacan, Ernesto M. Pernia, dan Abuzar Asra. 2003. Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia: what do subnational data show ? *journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Arsyad Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Aryanti, Eni. Dan Iin Indarti. 2009. Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. *Jurnal Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Widya Manggala*.
- Badrudin, Rudy. 2012. Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Tipologi Klasen Dan *Location Quotient*. *JRMB*, Volume 7, No. 1.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. <https://bali.bpos.go.id/>. Diakses 15 september 2019.

- Blakely Edward, J. 1994. *Planning Local Economic Development Theory and Practice*, Second Edition. California USA: Sage Publications.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi ke 1. Cetakan keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Cubukcu K.Mert. 2011. The spatial distribution of economic base multipliers: A GIS and Spatial Statistic Based Cluster Analysis. *Journal Departemen of City and Regional Planning Dokuz Eylul University Izmir Turkey*, 8(2).
- Dewi Ardhiyanti, Ni Luh Putu. 2016. Trend Angka Morbiditas di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9 No.2.
- Dewi Rustariyani, Surya dan Wiwin Setyari, Ni Putu. 2011. Konvergensi Perekonomian di Bali: Inequality sebagai Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Piramida*, Vol. 7, no.2 Desember 2011.
- Erawati, N. k., & Nyoman Mahendra Yasa. 2012. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 1 no: 1 tahun 2012. (hal : 4)
- Fajrii, Muhammad. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (2), hal: 99-107.
- Fatkul Muin. 2014. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Gama, Ayu Savitri. 2009. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Vol 2, No.1.
- Gemechis D. Djira, Frank Schaarschmidt, and Bichaka Fayissa. 2008. Inferences for Selected Location Quotients with Application to Health Outcomes. *Departemen of Economic and Finance working papers series, Middle Tennessee State University*, Series 2008.
- Glimmer R. W., Keil S. R., and Mack R.S.. 1989. The Location Quotient and Central Place Theory. *Federal Reserve Bank of Dallas*, No. 8916.
- Herry Darwanto. 2002. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah. https://www.bappenas.go.id/files/591352281656heri__20091015103733__2313__0.doc. Diakses 15 September 2019.

- Isserman, A. M. 1977. The location quotient approach to estimating regional economic impacts. *Journal of the American Institute of Planners*, 43(1), 33-41.
- Jeffrey G. Woods. 2007. Regional Economic Growth and Income Distribution in California. *Journal of Business and Public Affairs*, 1(1), pp: 2-30.
- Jhingan, M.L.2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan Guritno. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Junaidi dan zulgani. 2011. Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Edisi III.
- Kadariah. 1979. *Ekonomi Perencanaan*. FE UI. Jakarta
- Kangjwan and Mengyi, Wang 2013. The Research of Low-Carbon Industrial Cluster in China Based on Location Quetient Method. *Journal of Business Management and Economics*, 4 (10), pp; 206-213.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*,9(1), hal: 1-11.
- Nata, Wirawan. 2016. *Statistika Ekonomi dan Bisnis Buku 1:(Statistika Deskriptif) Edisi Keempat*. Denpasar : Keraras Emas.
- Nurlatifa Usya. 2006. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang. *Skripsi* Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Oka, I Nengah. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*,8(1), hal: 63-71.
- Saerofi, M. 2005. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang. *Skripsi* Sarjana Jurusan Ekonomi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Teori Pengantar Makroekonomi, Edisi ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schaffer A. William. 2010. Regional Models of Income Determination: Simnple Economic Base-Theory. *Note A Techniques for Analysis*, pp: 1-40.
- Stephen Elias and Clare Noone. 2011. The Growth and Development of the Indonesian Economy. *Reserve Bank Of Australia*.

Analisis Keberadaan Sektor.....[Vivi Erlinda Thio Putrid dan Made Kembar Sei Budhi]

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suyana Utama, Made. 2010. *Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana; Denpasar.

Thomas R. Harris, George E. Ebai & j. Scott Shonkwiler. 1998. A Multidimensional Estimation of Export Base. *JRAP*, 28 (1), PP:3-17.

Wijaya, I B. Putra dan Mustika, Made Dwi Setyadhi. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Terhadap Pendapatan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) Provinsi Bali Tahun 2000-2012. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3 [4] : 124-133.

Wiwekananda, Ida Bagus Putu dan Suyana Utama, I Made. 2016. Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Buleleng Periode 2008-2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9 No. 1.

Yogi Swara, Wayan dan Jember, I Made. 2011. Kemiskinan di Bali. *Jurnal Piramida*, vol. 7, No. 2 Desember 2011.

Zheng, Tian. 2013. Measuring Agglomeration Using the Standardized Location Quotient with a BOOTstrap Method. *Journal of Regional Analysis and Policy*, 43 (2), pp: 186-197.